



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.11.4/Kep. 574 - BKAD/2025

TENTANG
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA
H. MAKRUS, S.Ag., M.Si. NIP. 19671219 199702 1 001 JABATAN KEPALA UPT
SMP SATU ATAP NEGERI KARANGWARENG KABUPATEN CIREBON.

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara H. MAKRUS, S.Ag., M.Si. NIP. 19671219 199702 1 001 Jabatan Kepala UPT SMP Satu Atap Negeri Karangwareng Kabupaten Cirebon telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tertanggal 19 September 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, setiap kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, Bupati melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah berdasarkan dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah terhadap Saudara H. MAKRUS, S.Ag., M.Si. NIP. 19671219 199702 1 001 Jabatan Kepala UPT SMP Satu Atap Negeri Karangwareng Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membebani Saudara H. MAKRUS, S.Ag., M.Si. NIP. 19671219 199702 1 001 Jabatan Kepala UPT SMP Satu Atap Negeri Karangwareng Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 8.236.808,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan rupiah) secara bertahap, atas Kerugian Daerah yang disebabkan kelalaian kehilangan 1 (satu) buah Hard Disk External 500 GB Merk Samsung, 3 (tiga) buah CPU Komputer Client Merk Advan, 1 (satu) buah LCD Projector Merk Benq dan 1 (satu) buah Organ/ Electone Merk Casio Tahun 2016.
- KEDUA : Mewajibkan kepada Saudara H. MAKRUS, S.Ag., M.Si. NIP. 19671219 199702 1 001 Jabatan Kepala UPT SMP Satu Atap Negeri Karangwareng Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk mengganti Kerugian Daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua Majelis Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD);
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. H. MAKRUS, S.Ag., M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400
email : bkad.cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 900.1.11.4/ 1003 /PBMD
Tanggal : 4 Agustus 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Penyampaian Draf Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembebanan Kerugian Daerah terhadap Saudara H. MAKRUS, S.Ag., M.Si. NIP. 19671219 199702 1 001 Jabatan Kepala UPT SMP Satu Atap Negeri Karangwareng Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Pasal 34 ayat (1) bahwa Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, Bupati melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah berdasarkan Dokumen SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan Pembebanan Kerugian Daerah terhadap Saudara H. MAKRUS, S.Ag., M.Si. NIP. 19671219 199702 1 001 Jabatan Kepala UPT SMP Satu Atap Negeri Karangwareng Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740530 199803 2 005

1. The first part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States. It is argued that the study of the history of the United States is essential for a full understanding of the country and its people. The paper then goes on to discuss the various methods used by historians to study the past, including the use of primary and secondary sources, and the importance of critical thinking in the study of history.

2. The second part of the paper discusses the role of the federal government in the development of the United States. It is argued that the federal government has played a central role in the development of the country, from the establishment of the Constitution to the present day. The paper then goes on to discuss the various policies and programs of the federal government, including the New Deal, the Great Society, and the Reagan Revolution. The paper concludes by arguing that the federal government has been a major force in the development of the United States, and that its role will continue to be important in the future.

3. The third part of the paper discusses the role of the states in the development of the United States. It is argued that the states have played a central role in the development of the country, from the establishment of the Constitution to the present day. The paper then goes on to discuss the various policies and programs of the states, including the New Deal, the Great Society, and the Reagan Revolution. The paper concludes by arguing that the states have been a major force in the development of the United States, and that their role will continue to be important in the future.

4. The fourth part of the paper discusses the role of the private sector in the development of the United States. It is argued that the private sector has played a central role in the development of the country, from the establishment of the Constitution to the present day. The paper then goes on to discuss the various policies and programs of the private sector, including the New Deal, the Great Society, and the Reagan Revolution. The paper concludes by arguing that the private sector has been a major force in the development of the United States, and that its role will continue to be important in the future.

5. The fifth part of the paper discusses the role of the military in the development of the United States. It is argued that the military has played a central role in the development of the country, from the establishment of the Constitution to the present day. The paper then goes on to discuss the various policies and programs of the military, including the New Deal, the Great Society, and the Reagan Revolution. The paper concludes by arguing that the military has been a major force in the development of the United States, and that its role will continue to be important in the future.

6. The sixth part of the paper discusses the role of the judiciary in the development of the United States. It is argued that the judiciary has played a central role in the development of the country, from the establishment of the Constitution to the present day. The paper then goes on to discuss the various policies and programs of the judiciary, including the New Deal, the Great Society, and the Reagan Revolution. The paper concludes by arguing that the judiciary has been a major force in the development of the United States, and that its role will continue to be important in the future.

7. The seventh part of the paper discusses the role of the media in the development of the United States. It is argued that the media has played a central role in the development of the country, from the establishment of the Constitution to the present day. The paper then goes on to discuss the various policies and programs of the media, including the New Deal, the Great Society, and the Reagan Revolution. The paper concludes by arguing that the media has been a major force in the development of the United States, and that its role will continue to be important in the future.